

HUBUNGAN STATUS EKONOMI DENGAN PERUBAHAN PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN

OLEH:

ABDUL SYANI¹⁾

ABSTRAK

Pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Lampung Saibatin pada umumnya telah mengalami perubahan. Ada Hubungan status ekonomi dengan perubahan upacara adat perkawinan tersebut. Kemampuan ekonomi yang relatif rendah, terbatasnya waktu dan tenaga masyarakat, cenderung mengakibatkan pelaksanaan upacara adat perkawinan secara utuh dan murni semakin berkurang. Pelaksanaan upacara perkawinan cenderung dilaksanakan secara sederhana, praktis dan ekonomis.

PENDAHULUAN

Perubahan secara umum menyangkut perubahan-perubahan struktur, fungsi budaya dan perilaku masyarakat. Proses perubahan masyarakat pada dasarnya merupakan perubahan pola perilaku kehidupan dari norma-norma sosial yang lama menjadi pola perilaku kehidupan baru. Setiap masyarakat selalu mengalami perubahan, baik perubahan fisik maupun non fisik. Perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya, baik bentuk maupun kecepatan perubahannya (Abdul Syani, 1995).

Menurut Soerjono Soekanto (1982), bahwa perubahan non fisik di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan-perubahan fisik dapat berupa perubahan sarana transportasi, pembangunan gedung-

1) Staf pengajar Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

gedung, dan lain-lain. Perubahan tersebut terjadi ada yang direncanakan terlebih dahulu dan ada pula yang tidak direncanakan.

Selo Soemardjan menjelaskan, bahwa bagi negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, pembangunan merupakan proses penyesuaian secara bertahap beberapa faktor sosial budaya yang disusul dengan usaha-usaha pelik dalam menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi baru, teknologi-teknologi baru, dan cara-cara organisasi dan cara kerja yang baru (Soleman B. Taneko, 1984). Sumber kekuatan utama untuk mewujudkan kesatuan pandangan dalam rangka mengarahkan gerak pembangunan pada taraf yang berhasil guna dan berdaya guna adalah pengakuan dan kepercayaan masyarakat yang dapat dipertahankan dengan fakta kemajuan secara terus menerus (Abdul Syani, 1995)

Pembangunan yang merupakan perubahan berencana menuntut perubahan sikap dan partisipasi masyarakat untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Perubahan sikap masyarakat dapat mempengaruhi proses pembangunan, khususnya mendorong kearah perubahan sosial ekonomi yang lebih maju. Dalam menghadapi proses pembangunan sekarang ini, masalah yang dihadapi adalah ketergantungan masyarakat terhadap nilai-nilai dasar dan tradisi budaya yang telah mengakar selama berabad-abad, sehingga menghambat proses transformasi nilai-nilai modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam implikasi yang lebih dalam, modernisasi sering secara diam-diam melemahkan atau bahkan sampai menghancurkan cara kehidupan tradisional dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi (Beling & Totten, 1980). Kondisi ini dapat menghambat proses keterbukaan masyarakat untuk dapat menerima inovasi.

Menurut P.J. Bouman, bahwa salah satu ciri masyarakat desa adalah terdapat adat kebiasaan yang kaku yang dilakukan oleh masyarakat sebagai syarat untuk pergaulan hidupnya yang akrab. Namun adat kebiasaan yang kaku tersebut, kini sudah diterobos oleh tekanan-tekanan dari luar, dalam hal ini

oleh pengaruh dari kota. Begitu pula dengan pergaulan hidup yang akrab di desa sudah banyak berubah, terutama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Pengaruh modernisasi pertanian;
- b. Perekonomian uang yang memberikan nilai-nilai hidup secara kebendaan saja;
- c. Terbukanya pedesaan oleh alat-alat perhubungan yang baru dan baik, seperti oleh kendaraan bermotor, pers, radio dan lain sebagainya, (Soekandar Wiriaatmadja, 1983).

Dengan masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan yang menawarkan peningkatan kehidupan manusia secara rasional, maka sikap dan perhatian masyarakat terhadap perubahan cenderung semakin terbuka. Kehidupan tradisi sebelumnya yang diagungkan kini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan sekarang. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dirasakan semakin tidak mampu memenuhi berbagai kepentingan sesuai dengan tuntutan hidup yang relatif tergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Abdul Syani, 1995).

Begitu juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Lampung Saibatin Kalianda. Masyarakat setempat beranggapan bahwa upacara adat perkawinan yang utuh dan murni tidak mutlak harus dilakukan. Hal ini didorong oleh perubahan pandangan terhadap nilai-nilai adat perkawinan yang secara ekonomis cenderung lebih banyak menyita waktu, tenaga dan biaya. Atas dasar kenyataan ini, maka pokok masalah penelitian ini adalah apakah ada hubungan status ekonomi dengan perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan?

Berdasarkan hasil pengamatan awal, diketahui bahwa upacara adat perkawinan secara utuh dan murni biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berada dalam status kepenyimbangan (ketokohan) dalam struktur adat dan status ekonomi yang relatif tinggi, atau sekurang-kurangnya

dapat mencukupi biaya upacara adat tersebut. Sebaliknya bagi anggota masyarakat yang berada dalam status ekonomi lemah dan menengah, cenderung melaksanakan upacara perkawinan secara sederhana sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis bahwa ada hubungan status ekonomi dengan perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan, khususnya pada masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.

METODE PENELITIAN

Dalam usaha mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang variasi status ekonomi dan kenyataan perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan upacara adat perkawinan yang terjadi di lokasi penelitian.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga di 5 (lima) desa Kecamatan Kalianda Lampung Selatan yang terdiri dari Desa Maja, Pauh, Tengkujuh, Jondong dan Betung sebanyak 600 Kepala Keluarga. Diketahui populasi ini cukup homogen, dengan indikasi bahwa masing-masing Kepala keluarga sama-sama pernah mengawinkan anaknya dan sama-sama dari golongan adat Saibatin. Oleh karena itu sampel penelitian cukup ditentukan sebesar 10% dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 60 Kepala Keluarga dengan teknik random sampling.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik kuesioner, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk menjangkau data dari sampel responden yang terpilih secara random. Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu status ekonomi dan upacara adat perkawinan. Secara operasional, variabel status ekonomi didefinisikan sebagai suatu posisi tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang diukur dari penghasilan rata-rata setiap bulan dari sektor

pertanian padi sawah, kebun kelapa dan pisang. Sedangkan upacara adat perkawinan didefinisikan sebagai bentuk puncak begawi adat atau upacara perkawinan yang menggambarkan kebesaran status keluarga dan kerabat penyelenggaranya dalam struktur kepenyimbangan menurut ketentuan adat Saibatin. Keutuhan dan kemurnian upacara adat perkawinan dapat diukur dari segi kelengkapan syarat, prosedur dan pola pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya data diolah dengan tahapan editing, koding, tabulasi dan sistimatisasi data. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah teknik statistik Chi-Square (X^2), yaitu sebagai berikut:

Rumus Teknik Statistik Chi-Square (X^2):

$$X^2 = \sum \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h}$$

Keterangan:

X^2 = Chi-Square (Kai Kuadrat)

f_o = Frekuensi yang diteliti

f_h = Frekuensi yang diharapkan.

Harga X^2 dapat menunjukkan probabilitas perbedaan frekuensi sampel yang diteliti (f_o) dengan frekuensi sampel yang diharapkan dalam populasi (f_h). Jika harga X^2_{hit} sama atau lebih besar dari harga kritik X^2_{tab} dengan jumlah N tertentu sesuai dengan signifikansi yang tersedia, maka berarti ada perbedaan yang meyakinkan antara f_o dan f_h . Perbedaan harga X^2 ini menunjukkan adanya perbedaan hubungan variabel X (status ekonomi) dengan kecenderungan perubahan variabel Y (pelaksanaan upacara adat perkawinan).

Signifikansi harga X^2 , secara kualitatif dapat diinterpretasikan sebagai estimasi (taksiran) adanya perbedaan hubungan antara status ekonomi lemah, menengah dan ekonomi kuat dengan kecenderungan perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan. Khusus untuk uji hipotesis diukur

melalui proporsi yang menunjuk pada angka 50% atau lebih berarti hipotesis diterima; sedangkan proporsi kurang dari 50% berarti hipotesis ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Status Ekonomi dan Perubahan Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan

Sikap masyarakat Lampung Saibatin Kalianda pada umumnya tidak setuju terhadap pelaksanaan upacara adat perkawinan secara utuh dan murni. Alasannya karena pelaksanaan adat perkawinan secara utuh dan murni tersebut sangat banyak memerlukan biaya, tenaga dan waktu. Diketahui bahwa masyarakat Lampung Saibatin di lokasi penelitian ini, sudah memiliki pemikiran yang relatif rasional dan ekonomis, sehingga ketergantungan terhadap tradisi upacara adat perkawinan cenderung semakin berkurang. Pelaksanaan kegiatan upacara adat perkawinan secara utuh dan murni dipandang tidak ekonomis dan tidak praktis; bahkan dianggap dapat menghambat usaha pencapaian kesejahteraan hidup masa depan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka saat ini masyarakat cenderung tidak melakukan upacara adat perkawinan secara murni dan utuh, melainkan lebih banyak dilaksanakan dengan pola sederhana yang dianggap dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga. Perubahan-perubahan ini diakui dan diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat, sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan pokok adat perkawinan tersebut.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa dalam setiap persiapan pelaksanaan adat perkawinan senantiasa didahului dengan pertimbangan ekonomis, rasional dan praktis. Penggunaan biaya adat diperhitungkan berdasarkan pandangan masa depan dengan menitikberatkan pada peluang kebebasan untuk berinisiatif dan memberikan kelonggaran dalam menentukan pola pelaksanaan upacara perkawinan sesuai dengan kondisi ekonomi.

Mengenai kekuatan sanksi adat yang diberikan terhadap pihak yang tidak mematuhi hukum adat setempat, telah semakin lemah. Melemahnya sanksi hukum adat ini karena meningkatnya penolakan masyarakat terhadap ikatan adat. Penolakan yang dilakukan bukan semata karena pengingkaran budaya, melainkan karena ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi persyaratan upacara adat perkawinan yang membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang relatif besar. Kondisi terakhir ini cenderung mendorong masyarakat untuk menyederhanakan pola pelaksanaan upacara adat perkawinan menjadi lebih praktis dan ekonomis.

Secara umum diketahui bahwa status ekonomi masyarakat dapat dikategorikan rata-rata rendah sampai menengah. Data lapangan menunjukkan bahwa interval penghasilan rata-rata masyarakat tiap bulan berkisar antara Rp 150.000,- sampai dengan Rp 750.000,-. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Status ekonomi masyarakat berdasarkan penghasilan rata-rata/bulan

Status Ekonomi (ribuan)	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Kuat/tinggi (550.000 s/d 750.000)	15	25,00
Menengah/sedang (350.000 s/d 549-999)	25	41,67
Lemah/rendah (150.000 s/d 349-999)	20	33,33
Jumlah	60	100,00

Sumber: Data primer

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Dari 60 responden, ada 25,00% responden yang dapat dikategorikan berpenghasilan (Rp 550.000-Rp 750.000); sebanyak 41,67% responden berpenghasilan menengah/sedang (Rp 350.000 - Rp 549.999), dan ada sebanyak 33,33% yang berpenghasilan rendah (Rp 150.000-Rp 349.999).

Dari masing-masing kategori status ekonomi masyarakat tersebut merupakan kumulatif penghasilan dari sektor pertanian dan perkebunan, yaitu padi sawah (45,00%), kelapa (35,00%), dan pisang (20,00%). Penghasilan dari ke tiga sektor ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, biaya pengolahan/pemeliharaan lahan dan tanaman, biaya sekolah anak, dan sebagian untuk keperluan sosial, termasuk persiapan biaya upacara adat perkawinan. Setelah diperhitungkan menurut fluktuasi nilai tukar uang berdasarkan perkembangan biaya yang diperlukan, maka secara umum status ekonomi masyarakat dapat dikategorikan relatif rendah.

Sementara dilain pihak mengenai kecenderungan perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Lampung, khususnya di lokasi penelitian ini, diketahui sebagian besar responden cenderung melaksanakan upacara adat perkawinan dengan pola sederhana atau meninggalkan sebagian syarat dan prosedur adat yang dianggap banyak menyita waktu, tenaga dan biaya. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Perubahan upacara adat perkawinan berdasarkan kelengkapan syarat, prosedur dan pola pelaksanaannya

Upacara adat perkawinan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Meninggalkan sebagian besar syarat dan prosedur	26	43,33
Dilaksanakan dengan pola sederhana	20	33,33
Dilaksanakan secara utuh dan murni	14	23,33
Jumlah	60	100,00

Sumber: Data primer

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 60 responden sebagian besar (43,33%) telah

meninggalkan sebagian besar syarat dan prosedur upacara adat perkawinan. Sebagian responden lain (33,33%) masih melaksanakan upacara adat perkawinan dengan pola yang sederhana. Sedangkan sisanya (23,33%) tetap melaksanakan upacara adat perkawinan secara utuh dan murni lengkap dengan atribut kebesaran adat (Abdul Syani, Laporan Penelitian 2001).

Beberapa syarat dan prosedur pokok dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan yang umumnya sudah ditinggalkan atau jarang dilakukan, yaitu ngelakau, nyabai, pembuatan babakhung (kelasa), ngesik khukuk, ngagegak buah, cakak panggakh, ngattak tulung dan upacara kebesaran adat. Sedangkan tahapan-tahapan yang masih dilakukan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan umumnya, yaitu proses pelamaran, nyesung/ngitai maju (tanpa peralatan adat), acara muli mekhanai pola baru dan upacara perkawinan dengan pola sederhana.

Pola kebiasaan baru pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut dianggap lebih praktis dan ekonomis, sehingga mendorong sebagian besar anggota masyarakat untuk meninggalkan beberapa prosedur dan persyaratan adatnya. Pola upacara adat yang seharusnya dilakukan dengan atribut kebesaran adat, telah diganti dengan pola sederhana, termasuk pengurangan terhadap tahapan-tahapan upacara adat.

2. Hubungan Status Ekonomi dengan Perubahan Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan

Setelah diketahui tentang kondisi status ekonomi dan perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Lampung sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka pada bagian ini akan diuji tentang perbedaan perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan antara golongan masyarakat ekonomi lemah, menengah dan golongan masyarakat ekonomi kuat. Perbedaan kecenderungan perubahan ini diinterpretasikan sebagai indikator adanya hubungan status ekonomi dengan perubahan pelaksanaan adat perkawinan. Untuk keperluan ini akan diuji dengan teknik statistik Chi-Square (X^2) yang didasarkan pada tabel silang sebagai berikut:

Tabel 3. Frekuensi silang antara status ekonomi dengan pelaksanaan upacara adat perkawinan

Status ekonomi (dalam ribuan)	Pelaksanaan adat perkawinan			Jumlah (%)
	Utuh/murni (%)	Sederhana (%)	Ditinggal (%)	
Kuat/tinggi (550-750.000)	13 (86,66)	1 (06,67)	1 (06,67)	15 (100,00)
Menengah/cukup (150-349-999)	4 (16,00)	12 (49,00)	9 (45,00)	
Lemah/rendah (150-349-999)	4 (20,00)	7 (36,00)	9 (45,00)	20 (100,00)
J u m l a h	14	20	26	60

Sumber: Data primer

Berdasarkan tabel silang di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- (a) Dari sejumlah 15 responden yang memiliki status ekonomi kuat, ternyata sebagian besar (86,66%) mempunyai kecenderungan untuk melaksanakan upacara adat perkawinan secara utuh dan murni, yaitu dilaksanakan secara lengkap sesuai dengan adat yang berlaku. Sedangkan sebagian lainnya (06,67%) melaksanakan upacara adat secara sederhana sesuai dengan kemampuan ekonominya, dan selebihnya (06,67%) adalah golongan masyarakat yang telah meninggalkan adat istiadat perkawinan.
- (b) Dari sejumlah 25 responden yang memiliki status ekonomi sedang, ternyata sebagian besar (48,00%) mempunyai kecenderungan untuk melaksanakan upacara adat perkawinan secara sederhana sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Sedangkan sebagian lainnya (36,00) meninggalkan syarat-syarat upacara adat, dan golongan selebihnya (16,00%) melaksanakan upacara adat perkawinan secara utuh dan murni.
- (c) Dari sejumlah 20 responden yang tergolong memiliki status ekonomi lemah, ternyata sebagian besar (45,00%) mempunyai kecenderungan untuk meninggalkan syarat-syarat upacara adat perkawinan. sebagian golongan lainnya (35,00%) melaksanakan upacara adat secara sederhana,

dan sisanya (20,00%) masih melaksanakan upacara adat perkawinan secara utuh dan murni.

Untuk mengetahui perbedaan perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan antara golongan masyarakat ekonomi lemah, menengah dan golongan masyarakat ekonomi kuat, maka akan dilakukan uji statistik dengan teknik Chi-Square (X^2) dengan tabel kerja sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel kerja Chi-Square (X^2) tentang perbedaan perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan berdasarkan status ekonomi

No	fo	Fh	fh - fh	(fo-fh) ²	(fo-h) ² fh
1.	13	3,50	9,50	90,25	25,79
2.	1	5,00	-4,00	16,00	3,20
3.	1	6,50	-5,00	30,25	4,65
4.	4	5,83	-1,83	3,35	0,57
5.	12	8,33	3,67	13,47	1,62
6.	9	10,83	-1,83	3,33	0,31
7.	4	4,67	0,67	0,45	0,09
8.	7	6,67	0,33	0,11	0,02
9.	9	8,67	0,33	0,11	0,01
Σ	60	60,00	0,00	157,34	36,26

Sumber : Tabel 3

Dari hasil uji statistik dengan teknik Chi-Square tersebut, diketahui harga X^2_{hit} sebesar 36,26. Setelah dikonsultasikan dengan harga kritik X^2_{tab} pada taraf signifikansi 99% dengan df 4 adalah 13,277, ternyata harga $X^2_{hit} > X^2_{tab}$. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang nyata perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan antara masyarakat ekonomi lemah, menengah dan masyarakat ekonomi kuat. Dengan demikian hipotesis kerja (H_a) diterima, yaitu ada hubungan status ekonomi dengan perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan (Abdul Syani, Laporan Penelitian, 2001). Dengan kondisi status ekonomi yang rendah/lemah dan menengah, maka ada kecenderungan masyarakat dalam melaksanakan upacara adat perkawinan dengan pola sederhana atau meninggalkan sebagian syarat dan prosedur adat yang dirasakan banyak memerlukan biaya.

Perubahan pola pelaksanaan upacara adat perkawinan erat hubungannya dengan perhitungan besar kecilnya biaya, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh masyarakat. Anggota masyarakat pada umumnya cenderung memilih dan menentukan prosedur upacara perkawinan yang relatif sederhana, praktis dan ekonomis, sesuai dengan kemampuan yang ada.

KESIMPULAN

Secara umum diketahui bahwa masyarakat Lampung Saibatin Kalianda telah memiliki pemikiran rasional dan ekonomis, sehingga ketergantungan terhadap tradisi pelaksanaan upacara adat perkawinan secara utuh dan murni cenderung semakin rendah. Sebagai konsekuensinya, pelaksanaan kegiatan upacara adat perkawinan tersebut semakin mengalami perubahan. Masyarakat cenderung melaksanakan upacara adat perkawinan dengan pola sederhana yang sedikit mungkin mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga.

Beberapa syarat dan prosedur pokok yang ditinggalkan atau semakin jarang dilakukan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan, yaitu ngelakau, nyabai, pembuatan babakhung (kelasa), ngesik khukuk, ngagegak buah, cakak panggakh, ngattak tulung dan upacara penobatan gelar adat. Sedangkan beberapa tahapan yang masih dipertahankan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan pada umumnya adalah proses pelamaran, nyesung/ngitai maju (tanpa peralatan adat), acara muli mekhanai pola baru dan upacara adat perkawinan dengan pola sederhana. Akibat dari menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, maka banyak tahapan upacara adat perkawinan yang ditinggalkan dan digantikan dengan pola kebiasaan baru yang lebih sederhana dan ekonomis.

Perubahan pola pelaksanaan adat perkawinan erat hubungannya dengan perhitungan besar kecilnya biaya, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh masyarakat. Pada umumnya anggota masyarakat cenderung memilih dan menentukan prosedur upacara adat perkawinan yang relatif sederhana dan praktis sesuai dengan kemampuan ekonominya. Bagi golongan masyarakat yang memiliki status ekonomi lemah/rendah dan menengah, cenderung melaksanakan upacara adat perkawinan dengan

pola sederhana atau mengurangi sebagian syarat dan prosedur adat yang dianggap banyak menyita waktu, tenaga dan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, 1995. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Abdul Syani, 1999. Perubahan Pelaksanaan Adat Perkawinan pada Masyarakat Lampung Saibatin Kalianda. Laporan Hasil Penelitian, Universitas Lampung.
- Beling & Totten, 1980. "Modernisasi Masalah Modal Pembangunan". Disunting Oleh Bur Rusanto. Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1985. "Metodologi Penelitian", Jakarta: LP3ES.
- Soleman B. Taneko, 1984. "Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan". Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. CV. Rajawali, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1983. "Statistik Sosial II". Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM.
- Sukandar Wiriaatmadja, 1983. "Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan"

ABSTRACT

THE RELATION OF ECONOMICAL FACTOR ON THE CHANGE OF TRADITIONAL MARRIAGE CEREMONY IN LAMPUNG SAIBATIN TRIBE

BY

ABDUL SYANI

Traditional marriage ceremony in Lampung Saibatin tribe has generally changed. There is an relation of economical status on it. Poor economy, limited available time and society resources, tends to decrease pure and complete traditional marriage ceremony. As a result traditional marriage ceremony is performed in simple, practical and economical way.